

Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Kholilur Rahman,
kholilur@iaiiibrahimy.ac.id
Fakultas Tarbiyah, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Abstract

This research was conducted to describe the history of Islamic educational institutions on the journey in the history of Indonesia through a long and tiring struggle. In the colonial era, various ways were done as a frontal effort from The Netherlands to stop the Islamic education that developed in some Islamic educational institutions which at that time was formed by pesantren and madrasah. Then on its development result to the dichotomy of educational institutions in Indonesia. Then on its development resulted in the dichotomy of educational institutions in Indonesia. This research uses literature method, which is a technique of collecting data through scientific literacy on the development of Islamic education institutions in Indonesia with the aim of revealing the travel side of Islamic institutions. So the results of this study can be useful to be a study of institutions of education. The result of this research is that many Netherlands colonial efforts to stop the educational process of Islamic education institutions under the pesantren and madrasah system. These efforts include the establishment of Priesnterraden, a strict supervision of educational processions in Islamic educational institutions; then published Teacher's Ordinance and Wild School Ordinance, as well as other efforts discussed in this study.

Keywords: *development, educational institution, Islam*

PENDAHULUAN

Pendidikan dimulai sejak dimulainya peradaban di bumi. Pendidikan terus berkembang seiring berkembangnya zaman tanpa henti. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW.

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya: "Tuntutlah Ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat".

Hadits tersebut memberikan satu indikasi makna bahwa belajar tak ada batas waktu, jenjang dan usia. Pendidikan sendiri sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW berawal dari keluarga, atau disebut dengan istilah pendidikan in-formal. Hal tersebut terlihat dari pendidikan keluarga Rasulullah dalam membimbing dan mengarahkan putra angkatnya, yakni sahabat Ali RA. dan Zaid bin Tsabit. Dua tokoh sahabat dan ulama tersebut memiliki kapasitas dan keilmuan luar biasa, tak lain karena berada dalam didikan keluarga Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah.

Kesuksesan Rasulullah di dalam mendidik tidak hanya dalam keluarga, bahkan para sahabat kala itu juga mendapatkan pendidikan dan bimbingan

rasulullah di berbagai forum. Dan yang paling populer di dalam beberapa literasi tentang sejarah pendidikan di masa rasulullah, adalah dilaksanakan di Serambi (Suffah) masjid yang kemudian di sebut dengan Ashabus Suffah.

Yang pertama kali tinggal di Shuffah adalah kaum Muhajirin. Oleh karena itu, terkadang shuffah ini melekat dengan mereka hingga juga dikenal dengan sebutan Shuffatul Muhâjirîn. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang hendak menjumpai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menyatakan keislamannya dan kesiapannya menaati Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam. Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di Shuffah, baik yang menetap dalam jangka waktu yang lama ataupun yang sekedar singgah saja.

Penghuni shuffah ini tidak hanya terdiri dari kaum Muhâjirîn ataupun para utusan saja. Sebagian Sahabat dari kalangan Anshâr juga menghuninya. Kendatipun mereka telah memiliki rumah di Madinah dan memiliki harta yang cukup. Kemauan mereka untuk hidup zuhud menjadi alasan mengapa mereka memilih tinggal di Shuffah. Diantaranya, Ka’ab bin Mâlik al Anshâri Radhiyallahu anhu, Hanzhalah bin Abi ‘Amir Radhiyallahu ‘anhu, dan Hârithah bin Nu’mân Radhiyallahu anhu.

Begitulah sekelumit sejarah tentang cikal bakal dan perkembangan pendidikan islam di zaman rosulullah yang terus berlangsung hingga kini. Namun dalam tulisan kali ini penulis tertarik untuk memotret sejarah perkembangan pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia sebagai lingkup kecil dari pendidikan Islam. Karena tidak dapat dipungkiri penting sekali untuk mengetahui sejarah perkembangan pendidikan terutama lembaga pendidikan Islam di Indonesia beserta dinamikanya sehingga kemudian muncul upaya-upaya dikotomi antara lembaga pendidikan sebagai sebuah agresi terhadap lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang secara mandiri di bawah komando para ulama. Tekanan-tekanan bangsa kolonial dari berbagai cara, dari membentuk kurikulum sekuler dalam desain kurikulum nasional, membuat undang-undang pendidikan, ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar adalah bukti-bukti sejarah yang konkrit bahwa lembaga pendidikan Islam melewati sejarah panjang dalam mempertahankan ciri khasnya yang berbasis keislaman.

Di tengah upaya “jihad’nya dalam mempertahankan ciri khas kegamaan, pesantren dan madrasah terus berkembang yang secara kompetitif bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren dan madrasah juga berupaya mendapatkan payung hukum pendidikan dari pemerintahan Indonesia secara legal-formal sehingga keberadaan lembaga pendidikan Islam mendapat legimitasi dari pemerintah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pustaka, di mana peneliti menela'ah beberapa literasi sejarah lembaga pendidikan Islam, baik pesantren maupun madrasah dengan tujuan dapat melacak perkembangan sejarah lembaga pendidikan Islam dan perjuangannya di bawah tekanan ideologi kolonial.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar dimaksimalkan dalam segala aspeknya. Agar pendidikan terlaksana dengan baik, maka tentunya dibutuhkan media atau forum yang disebut dengan Lembaga.

Lembaga pendidikan merupakan institusi, media, forum, atau situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara tradisi yang telah diciptakan sebelumnya (Roqib, 2009: 121). Dinamika lembaga pendidikan terus berkembang untuk menemukan bentuknya yang ideal dan melalui sejarah panjang, terutama perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dalam beberapa sumber bacaan kependidikan, jarang dijumpai pendapat para ahli tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Abuddin Nata mengungkapkan bahwa kajian lembaga pendidikan Islam (tarbiyah Islamiyah) biasanya terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai macam-macam lembaga pendidikan. Namun demikian, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri ke-Islaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik (Nata, 2005).

Pendidikan Islam pada awalnya hanya dipersepsi sebagai materi yang kemudian secara perlahan berubah dan berkembang juga dipersepsi sebagai institusi. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur Undang-undang tersebut. Dengan demikian, penyebutan "pendidikan Islam" bisa mencakup empat persepsi, yaitu pertama: pendidikan Islam dalam pengertian materi; kedua, pendidikan Islam dalam pengertian institusi; ketiga, pendidikan Islam dalam pengertian kultur; dan keempat, pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan yang islami (Soebahar, 2013).

Pendidikan Islam dalam pengertian institusi, maka yang dimaksud adalah institusi-institusi pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Madrasah sebagai sekolah Umum berciri khas Islam

(Soebahar, 2013). Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sudah tidak diragukan lagi. Ini bisa dilihat dari peran strategis pesantren, diantaranya:

1. pesantren masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam Indonesia. Ini tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa menuntut ilmu agama akan lebih mumpuni jika mondok di pesantren;
2. pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu memberikan pendidikan integratif (penggabungan) dan komprehensif (menyeluruh). Ini bisa dilihat dari perpaduan ilmu dengan moralitas santri;
3. tidak dibatasinya usia peserta didik, pendidikan seumur hidup dengan waktu 24 jam;
4. mengutamakan kejujuran, keikhlasan dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran;
5. persaudaraan sebagai watak santri. Dilihat dari kebersamaan santri dalam pondok pesantren dengan satu kamar berpenghuni banyak dan makan bersama dengan menu seadanya.

Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datangnya agama Islam telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang praktik kependidikannya sama dengan pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama pawiyatan, di lembaga tersebut tinggal Ki Ajar dengan cantrik. Ki Ajar orang yang mengajar cantrik orang yang diajar. Kedua kelompok ini tinggal disatu kompleks dan di sini terjadilah proses belajar mengajar. Dengan menganalogikan pendidikan pawiyatan ini dengan pesantren, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk menetapkan bahwa pesantren itu telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Sebab model pendidikan pesantren itu telah ada sebelum Islam masuk yaitu pawiyatan (Daulay, 2009: 21-22).

Dengan masuknya Islam, maka diperlukan sarana pendidikan, tentu saja model pawiyatan ini dijadikan acuan dengan mengubah sistem yang ada ke sistem pendidikan Islam. Inti dari pesantren itu adalah pendidikan ilmu agama, dan sikap beragama. Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Setelah anak didik telah memiliki kecerdasan tertentu, maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan kepada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Mahmud Yunus membagi pesantren pada tahap-tahap awal itu kepada empat tingkatan, yaitu : tingkat dasar, menengah, tinggi, dan takhassus. Sistem pendidikan pesantren baik metode, sarana fasilitas serta yang lainnya masih bersifat tradisional. Administrasi pendidikannya belum seperti sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, non-klasikal, metodenya sorogan, wetonan

hafalan. Menurut Zamaksyari Dhofier ada lima unsure pokok pesantren: kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik (Daulay, 2009: 22).

Pada awal perkembangannya, ada dua fungsi pesantren. Pertama, sebagai lembaga pendidikan; dan kedua, sebagai lembaga penyiaran agama. Kendatipun kini telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama itu masih melekat pada pesantren. Sampai kini, fungsi asli tersebut tetap dipelihara oleh pesantren dari pengaruh apa yang disebut modernisasi. Ini mungkin dilakukannya karena pesantren mempunyai "wilayah sosial" yang mengandung daya resistensi terhadap pengaruh buruk modernisasi. Di zaman kolonial dahulu pondok pesantren memegang peranan aktif dalam menentang penetrasi kolonialisme dengan uzlah yakni menutup diri dari pengaruh luar. Peran ini tetap dilanjutkannya, juga beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Oleh karena sifatnya yang tertutup di masa yang lampau itu dahulu, pesantren sebagai lembaga pendidikan, kurang dikenal secara nasional. Namun demikian, ketika membicarakan model pendidikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia, antara bulan Oktober 1935 sampai dengan bulan April 1936, pernah bertukar pikiran melalui majalah Pujangga Baru, Suara Umum, Pewarta Deli dan Wasita, yang kemudian dikumpulkan oleh Akhdiyati K. Mihardja dalam buku Polemik Kebudayaan 1948 (Ali & Ali, 1995: 146).

Yang menarik dalam Polemik Kebudayaan itu adalah pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara dan Dr. Sutomo, pemimpin golongan nasionalis, bukan pemimpin Islam, yang menginginkan agar pesantren dijadikan sebagai model pendidikan nasional. Menurut pendapat mereka, pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, lebih sesuai bagi bangsa Indonesia. Pesantren adalah warisan budaya Indonesia, karena itu seyogyanya pendidikan pesantren dijadikan model dalam menyusun perguruan nasional (Ali & Ali, 1995: 146). Dalam perkembangan berikutnya pesantren mengalami dinamika yang menjadikan pesantren berkembang dari yang tradisional ke modern. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, terutama setelah Indonesia merdeka, telah timbul perubahan-perubahan dalam dunia pesantren. Telah banyak di antara pesantren yang telah menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tersebut, kendatipun di sana sini masih ditemukan juga pesantren yang masih bersifat konservatif (Daulay, 2009: 22).

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah-tengah arus modernisasi, maka agar eksistensinya tetap bisa dipertahankan maka ada baiknya dikutip pendapat Nurcholish Madjid, bahwa pesantren diwajibkan oleh tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman untuk membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan nyata yang dapat melalui pendidikan atau pengajaran pengetahuan umum secara memadai. Dibagian ini pun sebagaimana layaknya

yang terjadi sekarang harus tersedia kemungkinan mengadakan pilihan-pilihan jurusan bagi anak didik sesuai dengan potensi buat mereka. Jadi tujuan pendidikan pesantren kiainya berada disekitar terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan agama Islam (Daulay, 2009: 75).

1. Lembaga Pendidikan Pesantren

Menurut Manfred Ziemek menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah pesantrian berarti "tempat santri". Santri atau murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren (kiai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz). Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Elemen-elemen pokok pesantren itu adalah : pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai. Ada juga yang menyebutkan unsure-unsur pokok pesantren itu hanya tiga, yaitu : 1. Kiai yang mendidik dan mengajar, 2. Santri yang belajar, 3. Masjid tempat mengaji (Daulay, 2009: 61-62). Ada beberapa alasan pokok sebab pentingnya pondok dalam satu pesantren, yaitu : pertama, banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kiai yang sudah termasyhur keahliannya. Kedua, pesantren-pesantren tersebut terletak di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar daerah. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiai adalah seolah-olah orang tuanya sendiri.

Hasil Studi Ronald Alan Lukens Bull (1977), Doktor yang menekuni studi pondok pesantren asal Amerika Serikat, menunjukkan bahwa sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M. Untuk menyebarkan agama Islam di Jawa dan tokoh yang berhasil mendirikan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pertama kali didirikan pondok pesantren di kembangkunging yang waktu hanya memiliki tiga orang santri, setelah itu Raden Rahmat pindah ke Ampel Denta dan mendirikan pondok pesantren yang selanjutnya dikenal dengan Sunan Ampel. Selanjutnya muncul pesantren-pesantren baru yang digagas oleh para santri dan putranya, seperti pondok pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pondok Pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pondok pesantren tuban oleh Sunan Bonang (Wahjotomo, 1997:70). Fungsi pondok pesantren pada awalnya hanya sebagai media islamisasi yang memadukan tiga unsur, yakni: ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan Islam, dan ilmu serta amal untuk mewujudkan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Soebahar, 2013: 34).

Bangunan pondok pesantren terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya santri. Akhirnya dengan bantuan dari masyarakat sekitar yang menaruh simpati, berkembanglah pemukiman

tersebut menjadi “kampus atau kompleks”, tempat para santri beribadah, mencari ilmu dan berinteraksi dengan kiai sebagai tokoh sentralnya yang menjadi panutan para santri dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama atau istilah pondok pesantren. Pondok berarti tempat tinggal, sedang pesantren merupakan penyantrian, yang memiliki dua arti, yakni tempat santri atau proses menjadi santri (Soebahar, 2013: 35).

Pesantren sendiri telah menempuh sejarah panjang, dari yang awalnya hanya menyebarkan ilmu bertransformasi menjadi lembaga yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, membentuk karakter serta menerima bentuk kurikulum pemerintah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan zaman, lalu kemudian muncul model-model pondok pesantren, yakni pondok pesantren modern, yakni pondok pesantren yang terbuka untuk perubahan, maju dan berkembang serta menerima kurikulum negara, ada pula yang berkomitmen untuk terus mempertahankan tradisi salafi dan konservatif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan, pesantren ini disebut dengan pesantren Salaf.

2. Lembaga Pendidikan Madrasah

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berbentuk formal. di mana dalam sistem pembelajarannya diatur secara sistematis. Madrasah adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar-mengajar secara terpadu dan sistematis. Prosedur pendidikannya diatur sedemikian rupa, ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman pada kurikulum, silabus, dan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran), ada jam-jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Madrasah atau sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, juga menentukan membentuk kepribadian anak didik yang islami. Bahkan madrasah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa madrasah atau sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan.

Secara historis keberadaan madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid. Sebab, proses pendidikan yang berlangsung di masjid pada periode awal terdapat pendidik, peserta didik, materi dan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Hanya saja, dalam mengajarkan suatu materi, terkadang dibutuhkan tanya jawab, pertukaran pikiran, hingga dalam bentuk perdebatan sehingga metode seperti ini kurang serasi dengan ketenangan dan rasa keagungan yang harus ada pada sebagian pengunjung-pengunjung masjid. Madrasah sebagai institusi pendidikan keagamaan di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pada zaman penjajahan Belanda, madrasah didirikan untuk semua warga. Sejarah

mencatat, madrasah pertama kali berdiri di Sumatra, Madrasah Adabiyah (1908, dimotori Syekh Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri Madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah Schoel. Madrasah Tawalib didirikan Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang (1907). Lalu, Madrasah Nurul Uman didirikan H. Abdul Somad di Jambi.

Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah-pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (mulai 1919); ada madrasah yang mengappropriasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah (1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Muballighin, dan madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus; atau model madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian. Pada awal masa kemerdekaan RI sampai adanya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase lumayan masih konsisten berdiri di atas orientasinya sendiri. Perubahan struktur sosial kemudian mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendasar yang dipolakan oleh sistem pendidikan nasional. Berbagai komponen bidang studi yang semula belum menjadi wilayah garapan madrasah.

Dahulu madrasah hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shiff (kelas) satu sampai dengan enam atau sampai belasan (seperti di Madrasah Mamba'ul Ulum). Kini, pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Ada komponen kurikulum secara teratur, ketatausahaan yang lengkap dan sebagainya. Pendek kata, madrasah mulai berusaha mengembangkan dirinya sesempurna mungkin, sebagai sisi lain dari sistem pendidikan nasional, terutama pada waktu lembaga ini menjadi rival Departemen Agama dengan kebijaksanaannya membentuk MWB (Madrasah Wajib Belajar).

Bila pada awal kemerdekaan, madrasah pada galibnya menolak campur tangan pemerintah, sikap itu muncul terutama karena negara baru ini berwatak duniawi dan nasionalistis. Sedangkan madrasah yang dikelola swasta memiliki tradisi keagamaan. Mulai masa MWB itu, madrasah mengakomodasikan sikap. Subsidi pemerintah dalam bentuk material mulai diterima. Maknanya, ia mulai membuka keterlibatan pemerintah dalam dunianya. Guru Agama Negeri-walaupun secara selektif-mulai diterima, bahkan menjadi kebutuhan terutama bagi yang kekurangan tenaga guru.

Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola sistem pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Kurikulum mulai dibicarakan bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan peningkatan kualitasnya. Sejak ini, banyak

perubahan-perubahan besar di madrasah. Akan tetapi secara ideal saat itu madrasah masih dapat konsisten pada titik tekan disiplin ilmunya, walaupun dipandang dari sudut prestasinya mengalami penurunan.

Suatu fenomena lain yang merupakan kelanjutan dari proses itu ialah ketika SKB Tiga Menteri tahun 1975 diterapkan pada madrasah. Sejak itu madrasah dituntut mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. SKB itu sebenarnya merupakan bentuk legalisasi saja dari tuntutan itu. Mulailah madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah dan madrasah negeri. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penegerian madrasah atau sekurang-kurangnya memfilialkan dengan negeri, ujian persamaan negeri dan UUB di madrasah.

B. Dikotomi Pendidikan Agama dan Sekular

Dikotomi dalam bahasa Inggris adalah dichotomy adalah pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian (Echols & Shadily, 1992: 180). Ada juga yang mendefinisikan dikotomi sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan (Depdikbud, 1989: 205). Secara terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik lainnya, seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam dan bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri (split personality) (Praktiknya, 1991: 104). Bagi Al-Faruqi, dikotomi adalah dualisme religius dan kultural (Al-Faruqi, 1982: 37).

Dikotomi adalah merupakan dua hal yang bertentangan yang dalam konteks pembahasan ini adalah dikotomi yang terjadi antara pendidikan Islam dan pendidikan sekular yang tidak dipungkiri terbentuk dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan lahirnya dua lembaga pendidikan berciri khas berbeda, yakni sekolah dan madrasah. Sekolah merupakan representasi dari sebuah proses pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran umum, sementara madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan yang berciri khas keislaman karena banyak porsi materi agama dari pada materi umum dan sekular.

Persoalan dikotomi dan dualisme terasa sudah mendarah-daging dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini lantaran dikotomi dan dualisme itu sudah ada sejak lama, tepatnya ketika Belanda menjajah negeri ini (Saridjo, 1996: 22). Latar belakang munculnya dikotomi dalam pendidikan itu didasarkan pada beberapa kepentingan Belanda sebagai bangsa penjajah, seperti: untuk meningkatkan pengetahuan mereka berkaitan dengan ilmu-ilmu umum dan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia, keperluan tenaga pembantu rumah tangga dari penduduk pribumi sehingga mereka diberikan pendidikan secukupnya, ingin mendapatkan simpati dari warga penduduk pribumi karena

jasa pendidikan yang diberikan, kepentingan misionaris, dan lain sebagainya (Mestoko, 1979: 41).

Pada era penjajahan Belanda, dikotomi muncul sebagai bentuk deskriminasi Belanda terhadap warga Indonesia. Ini terlihat dari pendidikan yang tidak seimbang antara belanda dan warga indoneisa. Warga belanda mendapatkan pendidikan di kelas-kelas khusus, sementara warga Indonesia hanya bisa menempuh pendidikan di kelas-kelas yang tujuannya tidak untuk mencerdaskan serta meningkatkan taraf sosial. Akan tetapi, ditujukan untuk mempertahankan perbedaan sosial.

Berbicara lebih jauh tentang pengdikotomian ilmu hal ini sangatlah terkait dengan masalah dikotomi pendidikan (kelembagaan), sehingga berimbas pada terjadinya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama dalam arti kelembagaan yang dimana hal ini merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda, karena anak-anak yang bisa masuk sekolah Belanda sebelum kemerdekaan hanya 6% dan terbatas bagi anak-anak kaum bangsawan dan saudagar, maka anak-anak orang Islam memilih madrasah atau pondok pesantren, yang memang sudah ada sebelum munculnya sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Karena tekanan politik pemerintah kolonial, maka sekolah-sekolah agama Islam memisah diri dan terkontak dalam kubu tersendiri. Sehingga dengan sendirinya mulailah pendidikan terkotak-kotak (dikotomi) antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Bila kita menoleh sejarah pendidikan Islam maka menurut Azyumardi Azra, hal ini bermula dari historical accident atau “kecelakaan sejarah”, yaitu ketika ilmu-ilmu umum (keduniaan) yang bertitik tolak pada penelitian empiris, rasio, dan logika mendapat serangan yang hebat dari kaum fuqaha (Muliawan, 2005: 206-208).

Pemerintah Belanda menerapkan pengawasan dan kontrol yang sangat ketat dan kaku, kontrol yang ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat dan bahkan menghalang-halangi pelaksanaan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu badan yang khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesnterraden (Fauzan, 2004: 164)

Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama, dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam perkembangannya, Ordonansi Guru itu sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru adama mendapatkan surat izin menjadi keharusan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja (Maksum, 1999: 115). Peraturan ini mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan

Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdatul Watan dan lain-lain.

Selain Ordonansi Guru, pemerintah Belanda mengeluarkan pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Selain itu untuk lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama (Zuhairini, et al., 2008: 150).

Dikotomi yang tercipta di zaman kolonial belanda tak bisa leang bahkan sampai bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada tahun 1945. Oleh karenanya, Departemen Agama tampil untuk mengarahkan Madrasah agar tidak berjalan sendiri dan mengacu pada Standar yang diberlakukan untuk sekolah umum. Sehingga pada tahun 1975 menteri agama, menteri dalam negeri dan menteri pendidikan sepakat untuk mengeluarkan SKB menteri yang bertujuan untuk membuat langkah konvergensi terhadap Dikotomi lembaga pendidikan di Indonesia.

C. Usaha konvergensi Lembaga Pendidikan Agama dan Sekular

Pada tahun 1972 dan tahun 1974, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No 34/1972 dan Inpres No 15/1974 yang dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dan pendidikan nasional yang memunculkan reaksi keras umat Islam. Untuk meredam reaksi tersebut kemudian muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada 1975 yang mensejajarkan level madrasah dengan sekolah umum, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setingkat dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setingkat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) yang setingkat dengan SMA. SKB tiga menteri ini pada hakikanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1975, Bab I Pasal I disebutkan bahwa yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.

Dengan terbitnya SKB tiga Menteri tahun 1975, pada fase ini mata pelajaran umum di madrasah di setiap levelnya lebih banyak, yakni sekitar 70%. Walaupun demikian, kedudukan mata pelajaran agama tetap memegang peranan yang amat penting seperti tertera dalam kurikulum madrasah Aliyah Tahun 1984, sekitar 30%. Dengan dikeluarkannya SKBTiga Menteri tersebut, maka madrasah memasuki era baru, yakni era kesetaraan dan kesederajatan

antara madrasah dengan sekolah. Ini adalah salah satu bentuk upaya konvergensi atas dikotomi dua lembaga pendidikan yang berciri khas berbeda.

Dengan demikian pergumulan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung, melalui proses yang panjang lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mendekatkan berbagai kutub pendidikan yang dualistis dan dikotomis di Indonesia.

Akan tetapi kenyataan ini tidak dapat menghilangkan paradigma dualisme dan dikotomi pengelolaan yang selama ini melingkupi pendidikan nasional. Departemen Agama sebagai otoritas pengelolaan pendidikan agama berhadapan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola pendidikan umum sehingga muncul persoalan adanya dikotomisasi kurikulum, diskriminasi lulusan, kebijakan moneter yang tidak seimbang dan lain-lain

Dengan UU. No. 20 Tahun 2003 dan PP. No. 19 Tahun 2005 diharapkan mampu prinsip otonomi yang diakomodasi adalah adanya pengakuan terhadap otonomi sekolah, di samping penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut telah memberi peluang yang sama untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak ada diskriminasi di mata negara, sehingga diharapkan dapat menjembatani dualisme dan dikotomi.

SIMPULAN

Lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga pendidikan Islam terdiri dari lembaga pendidikan Pesantren dan lembaga pendidikan Madrasah. Pesantren pertama di Indonesia dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M kemudian didirikan oleh Raden Rahmat (sunan Ampel) yang terus berlanjut hingga zaman kolonial belanda menjajah Indonesia. Sistem pendidikan pesantren pada awalnya, baik metode, sarana prasarana, masih bersifat tradisional karena pesantren cenderung konservatif dari sistem pendidikan sekular yang dimotori oleh belanda. Namun meski perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa ketat terutama waktu penjajahan kolonial belanda pesantren selalu bisa menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang konsisten mengajarkan nilai-nilai agama.

Madrasah adalah model kedua dari pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia juga mengalami perjalanan yang panjang. Tekanan-tekanan dari kolonialisme belanda juga gencar diarahkan untuk melemahkan sistem pendidikan di madrasah, salah satu bentuk strategi

tekanan kolonialisme adalah terbentuknya dikotomi lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan sekular. Kemudian terbitnya ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Adalah salah satu bentuk konkrit sejarah bahwa perjalanan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidaklah mulus dan penuh dengan dinamika kecaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Faruqi, I. R. 1982. *Islamization of Knowledge : General Principles and Workplan* Hemdon : HIT
- Ali, D. M & Ali, D. H. 1995. *Lembaga – lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Daulay, P. H. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Echols, M. J & Shadily, H. 1992. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Utama
- Fauzan, S. 2004. *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara, Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M*. Bandung: Angkasa
- Maksum. 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Mestoko, S. 1979. *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Muliawan, U. J. 2005. *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nata, A. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Pratiknya, W. A. 1991. *Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Muslih Usa (Ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* . Yogyakarta : Tiara Wacana
- Roqib, M. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKIS
- Saridjo, M. 1996. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amisco

Soebahar, A. H. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordinansi Guru sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zuhairini *et al.* 2008. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara